JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI DESA HAKURUNG KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Misna[1], Jumaidi[2], Agus Surya Dharma[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: misnaayting@gmail.com

ABSTRAK

Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan transformasi layanan kesehatan dasar yang menyasar seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia. Topik ini penting dikaji karena observasi awal di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan menemukan beberapa fenomena masalah, yaitu belum tercapainya target sasaran program secara menyeluruh, kurangnya partisipasi ibu balita dalam pemeriksaan rutin, sosialisasi program yang belum optimal, koordinasi antarpelaksana yang belum maksimal, kader yang masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem ILP, serta lansia yang belum mampu beradaptasi dengan program tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Program Posyandu ILP menggunakan teori Warwick yang mencakup kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelas informan dipilih dengan teknik purposive sampling, dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang cukup efektif yaitu sikap masyarakat dan pembagian wewenang. Adapun indikator yang kurang efektif yaitu: Pertama, kemampuan teknis. Kedua, hubungan antar organisasi. Ketiga *Standard Operating Procedure* (SOP). Keempat penyaluran informasi. Kelima, kejelasan informasi. Keenam partisipasi masyarakat. Ketujuh tanggung jawab. Faktor yang memengaruhi Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada dua faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendorong ada tiga, yaitu kemampuan teknis kader yang memadai, sikap masyarakat yang positif, dan pembagian wewenang yang jelas. Faktor penghambat ada empat, yaitu keterbatasan sarana prasarana, rendahnya partisipasi kelompok tertentu, koordinasi pemerintah desa yang belum optimal, dan sosialisasi yang belum menyeluruh.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Posyandu Integrasi Layanan Primer, Pelayanan Kesehatan Masyarakat

ABSTRACT

The Integrated Primary Care Posyandu (Posyandu ILP) program is a transformation of basic health services covering the entire community life cycle, from infants to the elderly. This topic is important to study because initial observations in Hakurung Village, Daha Utara District, Hulu Sungai Selatan Regency revealed several problem phenomena, namely the program's target coverage has not been fully achieved, low participation of mothers in bringing toddlers for routine check-ups, program socialization that has not run optimally, coordination among implementers that has not been maximal, cadres who are still in the process of adjusting to the new ILP system, and the elderly who have not yet been able to adapt to the program. This study aims to examine the implementation of the Posyandu ILP program using Warwick's theory, which covers organizational capacity, information, support, and division of potential. The study uses a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Eleven informants were selected using purposive sampling, and the data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The implementation of the Integrated Primary Care Posyandu (ILP) Program in Hakurung Village, Daha Utara District, Hulu Sungai Selatan Regency has been less than effective. This can be seen from the indicators that are fairly effective, namely community attitude and distribution of authority. The indicators that are less effective are: first, technical capacity; second, inter-organizational relations; third, Standard Operating Procedure (SOP); fourth, information distribution; fifth, information clarity; sixth, community participation; seventh, accountability. The factors influencing the implementation of the Integrated

Primary Care Posyandu (ILP) Program in Hakurung Village, Daha Utara District, Hulu Sungai Selatan Regency consist of two, namely supporting factors and inhibiting factors. There are three supporting factors, namely adequate technical competence of cadres, positive community attitudes, and clear division of authority. There are four inhibiting factors, namely limited facilities and infrastructure, low participation of certain groups, suboptimal coordination with the village government, and incomplete socialization.

Keyword: *Policy Implementation, Integrated Primary Care Posyandu, Community Health Services*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek paling penting yang harus dimiliki oleh setiap individu agar dapat melaksanakan kegiatan hidupnya secara produktif. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sehat yang meliputi fisik, mental, spiritual, maupun sosial, sehingga memungkinkan setiap individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis, sementara Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah (Chandler dan Plano, dalam Freska, 2023), dan Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak (Depkes RI, 2006). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, muncul transformasi Posyandu menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang memperluas sasaran dari sebelumnya hanya bayi, balita, dan ibu hamil, menjadi mencakup remaja, usia produktif, dan lansia atau lazim disebut mencakup seluruh siklus hidup manusia, melalui sistem lima meja yaitu pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Secara historis, Posyandu lahir dari gagasan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) pada era 1970-an yang menekankan pendekatan promotif dan preventif, meski saat itu masih berjalan parsial dan belum terkoordinasi. Titik balik terjadi pada tahun 1984 ketika lima program kesehatan dasar yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan Diare disatukan dalam satu wadah pelayanan terpadu, yang kemudian diresmikan secara nasional pada 29 April 1985. Pada tahun 1990, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9, peran Posyandu diperluas dengan lahirnya Posyandu Lansia dan Posbindu untuk skrining penyakit tidak menular, meski layanan-layanan tersebut masih berjalan terpisah. Barulah melalui program Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan menjadikan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai pilar utama dengan Posyandu sebagai ujung tombak pelaksanaannya, mengubah Posyandu dari sekadar pos penimbangan balita menjadi pusat layanan kesehatan yang holistik bagi seluruh siklus hidup manusia.

Posyandu ILP memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang kekurangan fasilitas kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan sekaligus menurunkan angka kematian ibu dan anak, memberdayakan masyarakat melalui edukasi kesehatan, mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular melalui deteksi dini dan imunisasi terintegrasi, mengoptimalkan pemantauan tumbuh kembang anak guna mendeteksi dini masalah gizi seperti stunting, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara puskesmas, kader, dan pemerintah desa agar layanan kesehatan berjalan terkoordinasi dan berkelanjutan. Kompleksitas tujuan tersebut menuntut kesiapan kelembagaan yang matang di tingkat pelaksana, sehingga relevan dikaji menggunakan teori implementasi yang menyoroti

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi sebagai prasyarat keberhasilan program.

Kegiatan Posyandu ILP di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasungkan, Kecamatan Daha Utara, dilaksanakan secara rutin setiap bulan di beberapa desa, salah satunya Desa Hakurung yang memiliki tiga unit posyandu, yaitu Posyandu Aisyah, Sapiah 1, dan Sapiah 2. Meskipun secara kebijakan Posyandu ILP memiliki peran strategis, observasi awal peneliti menemukan beberapa fenomena masalah dalam pelaksanaannya, yaitu: (1) belum tercapainya target sasaran program Posyandu ILP secara menyeluruh; (2) kurangnya partisipasi ibu balita dalam membawa anak mereka untuk pemeriksaan ke Posyandu ILP secara rutin; (3) sosialisasi program Posyandu ILP kepada masyarakat belum berjalan secara optimal; (4) koordinasi dan komunikasi antarpihak pelaksana program belum berjalan maksimal; (5) kader posyandu masih dalam tahap penyesuaian terhadap sistem program ILP yang baru; dan (6) masyarakat, khususnya lansia, belum mampu beradaptasi dengan program Posyandu ILP.

Implementasi merupakan penempatan suatu kebijakan ke dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak nyata, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Freska, 2023) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, dan implementasi tidak akan dimulai sebelum sasaran dan tujuan ditetapkan melalui keputusan kebijakan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan tersebut, Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, dikutip dalam Freska, 2023) memaknai implementasi sebagai kejadian dan kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik upaya administrasi maupun upaya untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Kedua pandangan ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar proses administratif, melainkan rangkaian tindakan yang harus menghasilkan perubahan nyata sesuai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu teori implementasi yang relevan untuk menganalisis program berbasis komunitas seperti Posyandu ILP adalah teori Warwick (Kadji, 2015: 70), yang mengemukakan empat variabel penentu keberhasilan implementasi. Pertama, kemampuan organisasi, yang mencakup kemampuan teknis pelaksana, kemampuan menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi pada bidang yang sama, serta kemampuan mengembangkan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman tata aliran kerja. Kedua, informasi, yang berkaitan dengan penyaluran dan kejelasan informasi dari para pelaksana kepada objek kebijakan. Ketiga, dukungan, yang berkaitan dengan kesediaan objek kebijakan untuk terikat pada kegiatan atau kewajiban tertentu, tercermin dari partisipasi dan sikap masyarakat. Keempat, pembagian potensi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab antarpelaksana program agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Keempat variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, di mana kemampuan organisasi yang memadai akan mendukung penyaluran informasi yang lebih baik, informasi yang jelas akan mendorong dukungan dan partisipasi masyarakat, sedangkan pembagian potensi yang jelas akan memperkuat koordinasi antarpelaksana, sehingga interaksi keempatnya menentukan tingkat efektivitas implementasi suatu program di lapangan.

Penelitian Sudrajat, Kristian, dan Febriani (2024) mengkaji implementasi Program Posyandu Lansia di Desa Cimeuhmal, Kabupaten Subang, menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan menemukan kendala pada aspek sumber daya serta komunikasi kepada kelompok lansia. Sementara itu, penelitian Putri dan Adnan (2025) menganalisis implementasi Program Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

(ILP) melalui posyandu di Nagari Kasang menggunakan teori David C. Korten yang berfokus pada kesesuaian program dengan kebutuhan, kemampuan, dan nilai-nilai penerima manfaat, dan menemukan bahwa kesesuaian antara program dengan karakteristik masyarakat setempat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Kedua penelitian tersebut memperkaya kajian implementasi program posyandu dan ILP, namun keduanya belum menggunakan kerangka teori Warwick yang secara spesifik menyoroti kemampuan organisasi pelaksana dalam melayani multi kelompok sasaran lintas siklus hidup secara bersamaan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kesenjangan tersebut sekaligus memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik pada isu implementasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas yang masih relatif baru di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Posyandu ILP di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditinjau dari empat variabel teori Warwick, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi program tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu peneliti menggambarkan keadaan di lapangan secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang saling berhubungan untuk memperoleh pemahaman mendalam atas fenomena yang diamati (Sujarweni dan Arisudhana, 2025). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, yaitu pengamatan sistematis terhadap fenomena yang tampak di lapangan selama pelaksanaan kegiatan posyandu berlangsung, mencakup alur pelayanan, interaksi antara kader dan masyarakat, serta kondisi sarana prasarana yang tersedia; wawancara mendalam dengan seluruh informan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur agar diperoleh data yang mendalam namun tetap terarah pada fokus penelitian; dan dokumentasi terhadap data pendukung seperti laporan kegiatan bulanan, daftar hadir posyandu, serta catatan capaian sasaran pada masing-masing posyandu (Pasalong, 2016; Herdiansyah, 2014). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 11 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Warwick (Kadji, 2015: 70), yakni kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman (dalam Hardani et al., 2020), yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan agar lebih mudah dikelola. Kedua, penyajian data, yaitu penyusunan informasi dalam bentuk uraian naratif dan matriks kategori berdasarkan empat variabel teori Warwick, sehingga memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan antarkategori. Ketiga, penarikan simpulan, yaitu proses menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten yang muncul selama proses reduksi dan penyajian data. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, serta triangulasi sumber, teknik, dan waktu, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data yang berbeda (Sugiyono, 2017).

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan keputusan atau program yang telah ditetapkan, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling mendukung di lapangan.

1. Kemampuan Organisasi

   Kemampuan organisasi berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pelaksana dalam menjalankan Program Posyandu ILP, yang mencakup tiga indikator, yaitu kemampuan teknis, hubungan antar organisasi, dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

   a. Kemampuan Teknis

      Kemampuan teknis merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan implementasi program Posyandu ILP di tingkat lapangan. Tanpa penguasaan teknis yang memadai, kader tidak akan mampu menjalankan fungsi layanan kesehatan yang semakin kompleks sebagaimana diamanatkan oleh sistem ILP yang mengintegrasikan berbagai kelompok sasaran dalam satu alur pelayanan, dilihat dari keterampilan mengoperasikan alat kesehatan dan menjalankan alur pelayanan lima meja.

      Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi, pelaksanaan Posyandu ILP kurang efektif. Meskipun kader memiliki kemampuan teknis yang memadai dan menerapkan sistem rotasi tugas, masih terdapat kendala berupa keterbatasan alat dan obat, ruang pelayanan yang sempit, serta tuntutan melayani lima kelompok usia sekaligus. Hal ini sering membuat kader kewalahan, antrean memanjang, dan waktu layanan menjadi lama. Pelatihan yang ada juga belum cukup membekali kader sepenuhnya, sehingga dibutuhkan pendampingan dan waktu adaptasi lebih lanjut.

   b. Hubungan Antar Organisasi

      Hubungan antar organisasi merupakan elemen kritis dalam implementasi program Posyandu ILP, mengingat program ini melibatkan berbagai pihak yang harus bekerja secara sinergis, mulai dari puskesmas sebagai pembina teknis, bidan desa sebagai penanggung jawab medis di lapangan, kader posyandu sebagai ujung tombak pelayanan, hingga pemerintah desa sebagai mitra kelembagaan dan penyedia dukungan sumber daya. Kualitas koordinasi antarorganisasi sangat menentukan kelancaran alur informasi, ketepatan pembagian tugas, serta kemampuan bersama dalam mengatasi hambatan yang muncul di lapangan.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi koordinasi dan dukungan pelaksanaan Posyandu ILP kurang efektif. Meskipun alur komunikasi dan pembagian tugas antar petugas sudah terstruktur dan tertib, masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan waktu kehadiran petugas, penggabungan jadwal yang mengganggu, serta dukungan dari pemerintah desa yang belum optimal. Keterbatasan ini terlihat dari ruang yang sempit, ketersediaan obat dan alat yang tidak konsisten, sehingga diperlukan peningkatan sinkronisasi dan dukungan fasilitas agar pelaksanaan berjalan lebih baik.

   c. *Standard Operating Procedure* (SOP)

      Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman operasional yang menjadi acuan bagi para kader dalam menjalankan setiap tahapan kegiatan Posyandu ILP secara terstandar, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan SOP

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

sangat penting agar seluruh kader memahami tugas masing-masing, layanan diberikan sesuai urutan yang benar, dan kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun terjadi pergantian personel atau perubahan kondisi lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pelaksanaan Posyandu ILP kurang efektif. Meskipun sudah mengikuti pedoman dan alur kerja yang ditetapkan, penerapannya belum konsisten karena sering terjadi perubahan jadwal dan lokasi, penyesuaian prosedur di lapangan, serta tidak adanya panduan tertulis yang memadai.

2. Informasi

Informasi berkaitan dengan bagaimana pelaksana menyalurkan dan menjelaskan program kepada masyarakat, yang mencakup dua indikator, yaitu penyaluran informasi dan kejelasan informasi.

a. Penyaluran Informasi

Penyaluran informasi merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan program Posyandu ILP dalam menjangkau seluruh masyarakat sasaran. Tanpa alur penyebaran informasi yang efektif dan merata, masyarakat tidak akan mengetahui jadwal, lokasi, maupun jenis layanan yang tersedia, sehingga potensi kehadiran dan pemanfaatan program tidak dapat dioptimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penyaluran informasi Posyandu ILP kurang efektif. Meskipun sudah menggunakan saluran pengumuman, kunjungan rumah, dan WhatsApp, penyampaiannya belum merata cukup menjangkau orang dewasa, balita, dan lansia, namun kurang tepat sasaran bagi kelompok remaja. Selain itu, informasi hanya bersifat sementara, tidak didukung media permanen, serta jadwal yang kadang berubah, sehingga pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat program masih terbatas.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi merupakan dimensi yang tidak kalah penting dari sekadar penyampaian informasi itu sendiri. Kejelasan informasi mencakup sejauh mana masyarakat memahami tujuan program, manfaat layanan yang tersedia, prosedur teknis pelayanan, serta pentingnya hadir secara rutin sebagai bagian dari pemantauan kesehatan jangka panjang, yang secara langsung mencerminkan kualitas komunikasi yang telah dibangun oleh para kader.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kejelasan informasi program masih kurang efektif. Meskipun masyarakat umumnya memahami cakupan dan alur layanan, penjelasan mengenai ketersediaan obat serta istilah program belum disampaikan dengan lengkap. Hal ini menyebabkan kebingungan terutama pada lansia, serta partisipasi rendah pada kelompok remaja dan lansia, menunjukkan kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan yang dipahami.

3. Dukungan

Dukungan berkaitan dengan kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam program, yang mencakup dua indikator, yaitu partisipasi masyarakat dan sikap masyarakat.

a. Partisipasi Masyarakat

Tingginya partisipasi mencerminkan bahwa program telah berhasil diterima, dipercaya, dan dianggap relevan oleh masyarakat sasaran. Sebaliknya, rendahnya partisipasi mengindikasikan adanya hambatan, baik yang bersifat struktural seperti

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

keterbatasan fasilitas, maupun yang bersifat sosial-kultural seperti kurangnya kesadaran atau motivasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi partisipasi masyarakat dalam Posyandu ILP kurang efektif. Kehadiran belum merata, terutama sangat rendah pada kelompok remaja dan lansia. Faktor penyebab meliputi kesibukan, jadwal, persepsi, jarak, serta sosialisasi yang belum sesuai sasaran, sehingga cakupan keikutsertaan belum memenuhi target.

b. Sikap Masyarakat

Sikap masyarakat terhadap suatu program merupakan faktor penentu penting dalam keberlanjutan program tersebut. Sikap yang positif, ditandai dengan penerimaan, kepercayaan, dan apresiasi terhadap manfaat program, akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan, sebaliknya sikap yang apatis dapat menjadi hambatan meskipun semua sumber daya dan fasilitas sudah tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tanggapan masyarakat terhadap Posyandu ILP sudah cukup efektif. Layanan terpadu disambut baik dan tidak ditemukan penolakan yang berarti, meskipun pemahaman dan kebiasaan sebagian warga masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi lanjutan agar penerimaan semakin merata.

4. Pembagian Potensi

Pembagian potensi berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas antarpelaksana, yang mencakup dua indikator, yaitu pembagian wewenang dan tanggung jawab.

a. Pembagian Wewenang

Pembagian wewenang yang jelas merupakan prasyarat penting agar setiap pihak yang terlibat dalam program Posyandu ILP dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pembagian tugas dan wewenang di Posyandu ILP cukup efektif. Susunan peran antara bidan, ketua, dan anggota kader sudah terstruktur serta diterapkan sistem rotasi, sehingga pelaksanaan berjalan tertib, tidak tumpang tindih, dan lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya. Hanya sebagian warga yang belum memahami peran pemerintah desa, sehingga sosialisasi terkait hal ini perlu diperluas.

b. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut komitmen moral dan etika pelayanan yang ditunjukkan oleh para pelaksana dalam menjalankan tugas mereka secara konsisten, bahkan di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, bentuk pertanggungjawaban pelaksana Posyandu ILP di Desa Hakurung kurang efektif. Meskipun sudah ada pencatatan, pelaporan rutin, dan tindak lanjut berupa kunjungan rumah, mekanismenya masih bersifat reaktif dan seragam, belum disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran. Hal ini menyebabkan peningkatan kehadiran belum signifikan, terutama pada remaja dan lansia, serta belum mengatasi kendala lain seperti ketersediaan obat, keterbatasan ruang, dan penyampaian informasi yang belum optimal.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam melakukan sebuah penelitian pasti mendapatkan suatu kendala. Berikut uraian lebih lanjut mengenai hal yang menjadi pendukung maupun penghambat jalannya Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah berbagai hal yang membantu keberhasilan suatu program, kegiatan, atau pelayanan sehingga dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Kemampuan Teknis Kader yang Memadai

Kemampuan teknis yang memadai mencakup penguasaan keterampilan, penggunaan alat, serta pemahaman prosedur layanan yang sesuai standar. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga kegiatan program dapat berjalan dengan lancar, akurat, dan memberikan hasil yang terpercaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kemampuan teknis tenaga kesehatan dan kader Posyandu ILP sudah memadai sesuai standar, sehingga pelayanan berjalan lancar, tertib, dan memberikan hasil yang akurat.

b. Sikap dan Respon Masyarakat yang Positif

Sikap dan respon masyarakat yang positif mencerminkan penerimaan, dukungan, serta partisipasi aktif terhadap program. Ketika masyarakat menyadari manfaat yang diperoleh, mereka akan menyambut baik keberadaan layanan dan secara rutin mengikuti kegiatan yang diselenggarakan, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sikap serta respon masyarakat terhadap Posyandu ILP umumnya positif dan mendukung, meskipun partisipasinya belum merata yang didominasi oleh usia produktif dan balita, sedangkan remaja dan lansia masih jarang berpartisipasi.

c. Pembagian Wewenang yang Jelas dan Tidak Tumpang Tindih

Pembagian wewenang dan tugas yang jelas mengatur setiap peran sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini menghindari kesalahpahaman atau tumpang tindih pekerjaan, mempercepat proses pelayanan, serta membuat jalannya kegiatan menjadi lebih teratur, terstruktur, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembagian tugas dan wewenang di Posyandu ILP sudah jelas dan tidak tumpang tindih. Setiap pihak memahami perannya, sehingga pelayanan berjalan lancar dan tertib.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah berbagai hal yang menjadi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan suatu program sehingga mengurangi efektivitas dan optimalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Keterbatasan Alat Kesehatan dan Saranan Prasarana

Ketersediaan alat kesehatan dan sarana prasarana yang memadai merupakan syarat penting dalam menunjang kelancaran pelayanan. Apabila kondisi ini terbatas, maka proses pelayanan dapat terganggu, memakan waktu lebih lama, serta menurunkan kenyamanan bagi petugas maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sarana prasarana serta alat kesehatan di Posyandu ILP masih belum memadai. Keterbatasan jumlah alat, gangguan fungsi, dan ruang sempit menyebabkan pelayanan berjalan lebih lambat, kurang nyaman, dan tidak optimal.

b. Rendahnya Partisipasi pada Kelompok Sasaran Tertentu

Partisipasi masyarakat yang tinggi dan merata menjadi kunci keberhasilan suatu program kesehatan. Rendahnya kehadiran pada kelompok sasaran tertentu mengakibatkan jangkauan layanan menjadi tidak maksimal dan tujuan program tidak tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi masyarakat belum merata dan optimal yang mana didominasi oleh usia produktif dan balita, sedangkan remaja serta lansia sangat rendah. Penyebabnya meliputi kesibukan, anggapan sehat, jarak lokasi, dan jadwal yang bentrok dengan aktivitas lain.

c. Koordinasi dengan Pemerintah Desa yang Belum Optimal

Koordinasi dan dukungan dari pemerintah desa berperan penting dalam menjamin ketersediaan sumber daya dan kelancaran operasional posyandu. Jika hubungan kerja sama ini belum berjalan baik, maka dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala di lapangan akan terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koordinasi antara pengelola Posyandu ILP dan pemerintah desa sudah terjalin, namun belum optimal dan berkelanjutan. Dukungan sarana-prasarana masih terbatas, sehingga kebutuhan operasional lebih banyak mengandalkan ketersediaan yang ada.

d. Sosialisasi Program yang Belum Optimal dan Menyeluruh

Sosialisasi berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, waktu, dan tempat pelaksanaan program. Jika sosialisasi kurang maksimal, maka informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas dan dapat menurunkan minat serta keikutsertaan mereka.

Berdasarkan hasil wawancaradan observasi, sosialisasi program Posyandu ILP belum optimal dan menyeluruh. Informasi terbatas serta tanpa media pendukung memadai, sehingga sebagian masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, dan jadwal kegiatan, yang akhirnya menurunkan minat serta partisipasi.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan yaitu: Implementasi Program Posyandu ILP di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang cukup efektif yaitu: sikap masyarakat, karena masyarakat sudah menyambut positif layanan yang terintegrasi dan tidak ditemukan penolakan yang berarti, meskipun sebagian warga masih dalam proses membiasakan diri dengan sistem baru. Serta pembagian wewenang, karena susunan tugas antara bidan desa, ketua kader, dan anggota kader sudah terstruktur dengan baik dan berjalan tertib tanpa tumpang tindih. Adapun indikator yang kurang efektif yaitu: Pertama, kemampuan teknis, karena bidan desa dan kader sudah terampil mengoperasikan alat dan menjalankan alur pelayanan, namun masih terkendala keterbatasan sarana saat peserta padat. Kedua, hubungan antarorganisasi, karena koordinasi antarpelaksana sudah berjalan baik, namun dukungan pemerintah

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

desa masih belum optimal. Ketiga, Standard Operating Procedure (SOP), karena penerapannya belum konsisten dan masih banyak penyesuaian situasional. Keempat, penyaluran informasi, karena belum menjangkau kelompok remaja secara merata. Kelima kejelasan informasi, karena masih ada kebingungan masyarakat terkait ketersediaan obat dan istilah baru dalam program. Keenam, partisipasi masyarakat, karena tingkat kehadiran masih jauh di bawah target terutama pada kelompok remaja dan lansia. Ketujuh, tanggung jawab, karena tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak hadir masih bersifat reaktif dan belum terencana secara spesifik. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Program Posyandu ILP di Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi dua, yaitu: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya ialah kemampuan teknis kader yang memadai, sikap dan respons masyarakat yang positif terhadap layanan yang lebih terintegrasi, serta pembagian wewenang yang jelas dan tidak tumpang tindih. Sedangkan faktor penghambatnya ialah keterbatasan alat kesehatan dan sarana prasarana, rendahnya partisipasi pada kelompok sasaran tertentu, koordinasi dengan pemerintah desa yang belum optimal, dan sosialisasi program yang belum menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2019) *Dasar-dasar kebijakan publik*. Edisi revisi. Bandung: Alfabeta.

Depkes RI (2006) *Pedoman umum pengelolaan Posyandu*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Freska, D. (2023) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) di Jembatan Andi Tajang Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Skripsi. STIA Amuntai.

Hardani et al. (2020) *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Herdiansyah, H. (2014) *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Kadji, Y. (2015) *Formulasi dan implementasi kebijakan*. Gorontalo: UNG Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kemenkes RI.

Nasution, A.F. (2023) *Metode penelitian kualitatif*. Medan: CV. Harfa Creative.

Pasalong, H. (2016) *Metode penelitian administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.

Putri, M. dan Adnan, M.F. (2025) 'Implementasi program integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) melalui posyandu di Nagari Kasang', *Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), pp. 27-40. Available at: https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.7832 (Accessed: 11 July 2026).

Republik Indonesia (2023) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sudrajat, Y., Kristian, I. dan Febriani, F. (2024) 'Implementasi program posyandu (pos pelayanan terpadu) lansia di Desa Cimeuhmal, Kecamatan Tanjungsiang, Kabupaten Subang', *Jipolis: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), pp. 123-132. Available at: https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jipolis/article/view/3556 (Accessed: 11 July 2026).

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 3, 2026

Sugiyono (2017) *Metode penelitian kebijakan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, W. dan Arisudhana, A. (2025) *Metodologi penelitian kualitatif teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.